



---

## **Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro di Desa Waeheru Kecamatan Baguala Kota Ambon**

**Amir Faisal Kotaromalos<sup>1\*</sup>, Joana Joanita Tuhumury<sup>1</sup>, Nurainy Latuconsina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*Corresponding author email: [amir.kotaromalos@fisip.unpatti.ac.id](mailto:amir.kotaromalos@fisip.unpatti.ac.id)

---

### **History Article**

#### **Article history:**

Received September 7, 2023

Approved December 14, 2023

---

#### **Keywords:**

*model, collaborative, governance*

#### **ABSTRACT**

*The approach taken in doing this research is both quantitative and qualitative. Using Simple Likert Scale Formulas - and Qualitative Approaches: Interactive Analysis Models by Miles and Huberman (2014). The results obtained from this study are indicators (1). Being in a very bad category, because the average rating of the Governance Collaboration Implementation Indicator is in this category (1,56), where the sub-indicator Face to face to Dialogue is in very poor condition (1,54) The sub-Indicator Trust Building is also very poor (1,48), - Commitment to the Process, very poor (1,65). Shared Understanding, very bad (1,47) and Intermediate Outcomes are very bad. (1,68). Indicators (2) Collaboration inhibitors of governance, low knowledge factors, the spirit of entrepreneurship and self-reliance of low-level societies, awareness factors of unformed parties, personal ego and institutional factors of high-level Parties, budgetary factors that are still low. Indicators (3) The role and function of Micro Enterprise Building by Cooperative Services as a role and elements of Bank Indonesia as a Commodity/Product/Type Enterprise Builder (KPJU), the role of expanding access or financial inclusion by OJK, Capacity Building Micro Enterprises by Colleges, Motivation and Business Examples of Successful Entrepreneurs.*

#### **ABSTRAK**

Pendekatan yang ditempuh dalam meakukan riset ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan Menggunakan Rumus Skala Likert Sederhana - dan Pendekatan Kualitatif: Model Analisa Interaktif Miles dan Huberman (2014). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah indikator (1). Berada pada Kategori sangat tidak baik, karena nilai rata-rata Indikator Implementasi Collaborasi Governance berada pada kategori ini (1,56), dimana sub indikator Face to face to Dialogue (Dialog antar muka) berada pada kondisi yang sangat tidak baik (1,54) Sub indikator Trust Building (Membangun Kepercayaan) juga Sangat tidak baik (1,48), - Commitment to the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi), Sangat tidak baik (1,65). Shared Understanding (Pemahaman Bersama), Sangat tidak baik (1,47) dan Intermediate Outcomes

---

(Dampak Sementara) sangat tidak baik (1,68). Indikator (2) Faktor-faktor Penghambat Collaborasi Governance, faktor rendahnya pengetahuan, Jiwa usaha dan kemandirian berusaha dari masyarakat yang masih rendah, faktor kesadaran para pihak yang belum terbentuk, faktor ego personal dan Lembaga dari Para Pihak yang masih tinggi, faktor anggaran yang masih sedikit. Indikator (3) Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK, Capacity Building Usaha Mikro oleh Perguruan Tinggi, Motivasi dan Contoh Usaha dari Pelaku Usaha yang Berhasil.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Kotaromalos, A. F., Tuhumury, J. J., & Latuconsina, N. (2024). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro di Desa Waeheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 166–180. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.1799>

## PENDAHULUAN

Era globalisasi dewasa ini telah melahirkan revolusi industri keempat atau “kehancuran” yang berdampak signifikan pada perubahan pola kehidupan manusia di belahan bumi ini. Perubahan demi perubahan terus terjadi di segala bidang yang tidak dapat diprediksi, perilaku terstruktur yang rumit, dan sistem teknologi yang kompleks karena perubahan budaya memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Setelah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, pemerintah akan mulai fokus pada peningkatan standar sumber daya manusia (SDM) (Wulandari, 2021). Aset perusahaan yang paling berharga adalah sumber daya manusianya karena merupakan posisi kunci. Agar semua komponen sistem dalam suatu perusahaan berfungsi dengan baik, SDM perlu mendapat perhatian lebih. Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia" adalah semua kemampuan atau potensi penduduk serta sifat atau kualitas demografis, sosial, atau ekonomi yang dapat digunakan untuk pembangunan. Oleh karena itu, berbicara tentang sumber daya manusia berarti berbicara tentang penduduk secara keseluruhan, termasuk semua potensi atau keterampilannya. Dua komponen potensi manusia adalah kuantitas dan kualitas (Papayungan, 1995). Melalui program orientasi dan pelatihan keduanya sangat dibutuhkan tuntutan pekerjaan dan kapasitas tenaga kerja harus diselaraskan. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting jika tenaga kerja ingin menjadi lebih mandiri dan mahir dalam pekerjaan yang mereka pegang saat ini atau yang akan mereka lakukan di masa depan (Tufa, 2015). Sedangkan hasil temuan Suhu, dkk (2019) perlu dilakukan pemberdayaan oleh Masyarakat (Suhu, dkk, 2019), perencanaan Pembangunan (Wance, dkk, 2021), pemberdayaan kelompok usaha kecil Masyarakat (Alhadar, dkk, 2020), layanan transaksi non tunai (Salman, dkk, 2023), intervensi swasta dalam Masyarakat (Suhu, dkk, 2019).

Pelaksanaan program pemberdayaan desa dan kelurahan telah menjadi cita-cita nasional dari bangsa ini dalam penanggulangan kemiskinan absolut di akar masyarakat Indonesia, langkah operasionalnya kemudian didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005 yang pada hakekatnya memiliki tiga dimensi tujuan utama, yaitu: 1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab. 2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam

upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. 3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan bukan saja untuk memenuhi ketercukupan sandang, pangan, dan papan semata, akan tetapi mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, fisik, maupun mental spiritual. Keberhasilan dan kegagalan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada kualitas serta keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal utama dan pengelolaan pembangunan ekonominya sendiri. Desa Waiheru adalah salah satu desa di Kecamatan Baguala Kota Ambon yang banyak memiliki usaha rumahan. Usaha mikro, kecil yang terkenal di desa Waiheru adalah usaha tempe dan tahu, pandai besi, perbengkelan. Salah satu tempat pembuatan tempe tahu yang terkenal adalah usaha tempe tahu di samping Markas Komando 733 Reider. Pusat pembuatan tempe tahu ini merupakan usaha rumahan yang telah lama dirintis. Mas Suparno (Pemilik usaha) dan pemilik usaha yang lain (pandai besi dan perbengkelan) merasa usahanya kurang berkembang karena jaringan-jaringan usahanya mengalami gangguan semenjak Pandemi Covid-19 yang lalu.

Terindikasi juga pemerintah kurang memberikan perhatian kepada usaha ekonomi mikro dan kecil di desa ini. Pada sisi lain BUMDes Dewa Sejahtera dalam melaksanakan fungsinya terindikasi berkinerja buruk, karena dari hasil observasi lapangan tidak ditemukan pengembangan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha di Desa Waiheru, apa lagi kelas usaha mikro dan kecil. Hal ini nampak pada beberapa indikasi sebagai berikut: 1) Dana pengembangan ekonomi desa yang bersumber dari DD dan ADD yang dikelola BUMdes ditunjuk sebaiknya untuk membangun kios dan kafe yang memiliki daya sumbang keuangan bagi desa yang tidak signifikan. 2) Pelaku usaha mikro seperti (Ibu-ibu penjual nasi kuning, bubur ayam, nasi kelapa, nasi goreng, gado-gado, penjual ikan dan lain-lain) menggerakkan usahanya dengan modalnya sendiri yang pas-pasan dan sering bangkrut akibat tidak memiliki modal usaha lagi akibat terdesak kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan anak serta biaya kesehatan jika sakit. 3) Manajemen usaha BUMdes diatur sesuka hati oleh Pemerintah Desa, seperti bidang usaha penyewaan kios dan lahan usaha lain berada langsung dibawah kontrol Pemerintah Desa tidak memberikan manfaat pada usaha mikro yang memang sangat membutuhkan. Banyak kios di pasar waiheru yang kosong mubazir dan tidak bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat. 4) Bendahara BUMdes tidak pernah memegang uang hasil usaha BUMdes langsung diambil oleh Bendahara Desa. 5) Keuntungan usaha tidak diseving atau untuk diputar modalnya dengan memberikan bantuan pinjaman lunak bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil namun dibagi pada perangkat desa dan diberikan sedikit untuk pengurus BUMdes. 6) Pelaku usaha mikro di Desa Waiheru hampir secara keseluruhan mengandalkan modal usaha sendiri dan tidak ada peran BUMDes didalamnya, mulai dari sisi permodalan, pengembangan dan pemberdayaan usahanya, serta tidak ada kerja sama pengembangn usaha dengan dinas perindustian dan perdagangan, dinas koperasi, pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan serta para pelaku usaha serupa yang berhasil di Kota Ambon.

Pada hal potensi ekonomi diareal desa ini dalam usaha Mikro, kecil dan menengah jika diberdayakan dengan baik akan memicu penyegaran dan peningkatan usaha-usaha tersebut. Realita ini menurut hemat kami menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam beberapa pertanyaan riset yakni, - Bagaimana Model Colaborative Governance yang tepat dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon - Faktor-faktor apa yang berpengaruh pada Model Colaborative Governance dalam Pengelolaan

Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon - Bagaimana Strategi Penerapan Model Collaborative Governance yang tepat dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan - Bagaimana Model Collaborative Governance yang tepat dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon - Faktor-faktor apa yang berpengaruh pada Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon - Bagaimana Strategi Penerapan Model Collaborative Governance yang tepat dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Secara konseptual teoritik, kata collaborative (kolaboratif) atau collaboration yang berarti kerja sama. Pengertian yang lebih luas menurut Frans & Bursuck (dalam Afdal 2015:27) kolaboratif diartikan sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran (dalam Afdal,2015) yang menyatakan bahwa in collaborative, planning and implementing are joint effort. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Oleh Sink (dalam Zaenuri,2016) kolaboratif diartikan sebagai proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat dari Fosler (dalam Zaenuri, 2016) yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang kerja sama yang bersifat kolaboratif atau kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan eligment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama.

Dikatakan oleh Dwiyanto (2015) bahwa governance berasal dari kata “govern” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami pergeseran makna antara government dan governance, Leach dan Percy Smith dalam Hetifa (2009), mengungkapkan perbedaan terkait dua konsep tersebut bahwa government mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara governance meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government.

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell dan Gash, 2008). Secara khusus, collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi

sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik.

Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Chang, 2009). Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. menyebutkan bahwa collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh public (Junaidi, 2015), pembagian bantuan langsung tunai (Suhu, dkk, 2021).

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan oleh Ansell dan Grash dalam Sudarmo bahwa collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini (Junaidi, 2015) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi. b) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. c) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. d) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. e) Ketidakkampuan kelompokkelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. f) Mobilisasi kelompok kepentingan. g) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Collaborative governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara government, civil society, dan private sector dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan society. Kolaborasi antara government, civil society, dan private sector merupakan langkah-langkah optimalisasi peran government dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum dijelaskan bahwa collaborative governance merupakan sebuah yang di dalamnya untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016).

Dalam mengukur Variabel Model Collaborative Governance yang tepat dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, dirumuskan indikator sebagai berikut: A. Collaboration Governance: 1. Face to face to Dialogue (Dialog antar muka), 2. Trust Building (Membangun Kepercayaan), 3. Commitment to the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi), 4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama), 5. Intermediate Outcomes (Dampak Sementara). B. Faktor Penghambat: 1. Faktor Rendahnya Pengetahuan, Jiwa usaha dan Kemandirian Berusaha dari Masyarakat. 2. Faktor Kesadaran Para Pihak. 3. Faktor Ego Persaonal dan Lembaga dari Para Pihak. 4. Faktor Anggaran. C. Strategi Model Collaborative Governance: 1. Peran Pembinaan teknis Perdagangan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2. Peran serta Fungsi Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi Sebagai. 3. Peran serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU). 4. Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK. 5. Capacity Building Usaha Mikro oleh Perguruan Tinggi. 6. Motivasi dan Contoh Usaha dari Pelaku Usaha yang Berhasil.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi: Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Populasi: Pelaku Usaha Mikro dan Seluruh Aparatur Pemerintah dari Dinas dan lembaga terkait serta Pemerintah Desa

Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Sampel, diambil secara Purposive Sampling dengan ketentuan, diambil: (1) Kepala Dinas Koperasi Kota Ambon dan 2 orang Staff = 3 Orang, (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon beserta 2 orang Staff = 3 Orang, (3) Unsur Bank Indonesia = 3 Orang, (4) Unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = 3 Orang, (5) Kades dan Pengurus BumDes = 5 Orang, (6) Pelaku usaha Mikro = 50 Orang, (7) Pelaku usaha Kecil = 25 Orang, (8) Pelaku Usaha Menengah = 5 Orang, (9) Tokoh Masyarakat = 5 Orang, (10) Pelaku Usaha yang Berhasil = 1 Orang. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini diambil berjumlah = 100 Orang responden. Informan Penelitian (Analisis Kualitatif) Meliputi: (1) Kepala Dinas Koperasi Kota Ambon atau Staff, (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon atau Staff, (3) Unsur Bank Indonesia, (4) Unsur OJK, (5) Kades dan Pengurus BumDes, (6) Pelaku usaha Mikro, (7) Pelaku usaha Kecil, (8) Pelaku Usaha Menengah, (9) Tokoh Masyarakat. Analisa Data: Kuantitatif: Dengan Menggunakan Rumus Skala Likert Sederhana, Kualitatif: Model Analisa Interaktif Miles dan Huberman (2014).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Implementasi Kebijakan Kolaborasi Governance dalam Pengembangan usaha mikro pada Masyarakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata Indikator} = \frac{1,54+1,48+1,65+1,47+1,68}{5} = 1,56$$

Indikator	Sub Indikator	Kategori Nilai				
		SB 5,00- 5,99	B 4,00- 4,99	KB 3,00- 3,99	TB 2,00- 2,99	STB 0-1,99
Indikator Implementasi Collaborasi Governance	Sub Indikator Face to face to Dialogue (Dialog antar muka) dalam program kerja sama antar sesame pemangku kebijakan dengan pelaku usaha mikro (1,54)	-	-	-	-	X
	Sub Indikator Trust Building (Membangun Kepercayaan) dalam kerja sama (1,48)	-	-	-	-	X
	Sub Indikator Commitment to the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi) (1,65)	-	-	-	-	X

Indikator	Sub Indikator	Kategori Nilai				
		SB 5,00- 5,99	B 4,00- 4,99	KB 3,00- 3,99	TB 2,00- 2,99	STB 0-1,99
	Sub Indikator Shared Understanding (Pemahaman Bersama), (1,47)	-	-	-	-	X
	Sub Indikator Intermediate Outcomes (Dampak Sementara) (1,68)	-	-	-	-	X
	Jumlah	0	0	0	0	4

Pada sisi lain, Hasil analisa kualitatif untuk Indikator 1 Implementasi Collaborasi Governance, menemukan kenyataan bahwa: (1) Dialog antar muka dalam kolaborasi juga pernah dilakukan namun terbatas pada tiga pihak yakni pihak pemerintah desa, pelaku usaha mikro dan dinas badan terkait, (2) upaya membangun kepercayaan dalam berkolaborasi guna memberdayakan pelaku usaha mikro di desa ini belum terlaksana karena bentuk kolaborasi masih sanga sederhana dengan Cuma melibatkan pihak masyarakat dengan pemerintah desa dalam bentuk bantuan usaha terbatas, (3) belum pernah ada program kolaborasi yang lengkap. Kerja sama hanya bersifat sederhana antar pemerintah desa dengan pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga yang hanya sebagai penasehat keuangan saja. Walaupun komitmen yang terbangun sangatlah kuat namun tidak membawa dampak manfaat yang signifikan bagi kemajuan usaha karena di desa waiheru tidak pernah ada pelibatan pihak bank operasional seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri yang dapat memberikan kemudahan bagi kredit modal usaha warga di desa ini, (4) Di desa Waiheru, belum ada pemahaman bersama terhadap satu misi yang jelas, dimana misi tersebut akan dijadikan pegangan oleh setiap stakeholder untuk mengambil tindakan secara bersama-sama dalam mengatasi problem usaha mikro karena kolaborasi yang terbangun tidak sangat terbatas dan tidak ada keunggulan komparatif yang dapat diandalkan dalam mendukung misi bersama mengentaskan kemiskinan, (5) Pemerintah Desa Tidak Pernah mencari jalan untuk membangun MoU dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten dengan peningkatan Usaha Mikro dan Kecil didesa ini.

Dari hasil analisis kuantitatif pada Indikator 2, diperoleh nilai rata-rata dari faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Mikro di Masyarakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata Indikator} = \frac{1,44+1,42+1,45+1,38+}{4} = 1,42$$

Indikator	Sub Indikator	Kategori Nilai				
		SB 5,00- 5,99	B 4,00- 4,99	KB 3,00- 3,99	TB 2,00- 2,99	STB 0-1,99

Indikator	Sub Indikator	Kategori Nilai				
		SB 5,00- 5,99	B 4,00- 4,99	KB 3,00- 3,99	TB 2,00- 2,99	STB 0-1,99
Indikator Faktor-faktor	Faktor Rendahnya Pengetahuan, Jiwa Usaha dan	-	-	-	-	X
Penghambat Implementasi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Waiheru	Kemandirian Berusaha dari Masyarakat (1,44) Faktor Kesadaran Para Pihak (1,42) Faktor Ego personal dan Lembaga dari Para Pihak (1,45) Faktor Anggaran (1,38)	-	-	-	-	X   X
	Jumlah	0	0	0	0	4

Hasil Analisis kualitatif Indikator 2, Faktor Penghambat Implementasi kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi mikro di Masyarakat desa Waiheru, karena: (1) masyarakat Desa Waiheru memiliki Pengetahuan usaha yang masih rendah begitu pula dengan Jiwa usaha yang belum berkembang baik dan belum terciptanya Kemandirian Berusaha membawa dampak bagi pengembangan kerja sama usaha mikro di desa ini, (2) Belum adanya pengertian baik dan sudut pandang dari lembaga terkait yang berkompeten dalam menyatukan program mereka (Antara Dinas terkait serta pihak Bank dan pihak OJK) serta faktor perilaku dominan dari pelaku usaha mikro di desa ini yang tidak sadar, tidak disiplin serta cenderung tidak mau diatur dan kepala batu, tidak sadar akan nasib hidup mereka yang sudah semakin memperhatikan, (3) karakter agen dari lembaga-lembaga kolaborator terkesan egois dan arogan dalam pelatihan di tingkat desa sehingga dinilai tidak baik dan dapat menghalangi kolaborasi dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro bagi warga masyarakatnya sendiri, (4) Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kolaborasi dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, hal ini berpengaruh pada pengembangan usaha mikro di desa waiheru.

Hasil kuantitatif Indikator 3, Strategi Model Collaborative Governance, dengan perhitungan rata-rata sebagai berikut:

$$\frac{4,70 + 4,44 + 4,58 + 4,73 + 4,82 + 4,80}{6} = 4,67$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa Indikator Strategi Kolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat yang ditawarkan atau yang disetujui oleh Mayoritas Responden bersifat Positif atau Baik Karena nilai rata-rata Sub Indikator dari Indikator ini (4,67) atau Responden Setuju untuk Kolaborasi dalam Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mikro harus ditempuh dengan langkah:

Indikator	Sub Indikator	Kategori Nilai				
		SB 5,00- 5,99	B 4,00- 4,99	KB 3,00- 3,99	TB 2,00- 2,99	STB 0-1,99
Indikator Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Waiheru	Pembinaan teknis Perdagangan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan (4,70)	-	X	-	-	-
	Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi secara bersamaan dengan fungsi dari lembaga lain. (4,44)	-	X	-	-	-
	Perlu Peran serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) (4,58)	-	X	-	-	-
	Perlunya Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK (4,73)	-	X	-	-	-
	Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha (4,82)	-	X	-	-	-
	Perlunya pelatihan Motivasi dan Contoh Usaha dari Pelaku Usaha yang Berhasil (4,80)	-	X	-	-	-
	Jumlah	0	6	0	0	0

Hasil Analisis kualitatif Indikator 3, strategi kolaborasi dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat mikro harus ditempuh dengan langkah: (1) pembinaan teknis perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2) pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi secara bersamaan dengan fungsi dari lembaga lain, (3) perlu peran serta unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU), (4) perlunya peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK, (5) perlu langkah perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha, (6) perlunya pelatihan motivasi dan contoh usaha dari pelaku usaha

yang berhasil. Strategi ini hendaknya dilakukan secara bersamaan dalam bentuk kolaborasi antar lembaga terkait dengan kepentingan pemberdayaan atau pengembangan pelaku ekonomi mikro di tingkat desa.

Indikator 1. Implementasi Collaborasi Governance, temuan dari riset ini adalah: (1) Sub Indikator Face to face to Dialogue atau (Dialog antar muka), pada dasarnya dialog tatap muka dalam kolaborasi pernah dilakukan namun terbatas pada tiga pihak yakni pihak pemerintah desa, pelaku usaha mikro dan dinas badan terkait, sehingga informasi tentang kiat-kiat usaha yang didapatkan pelaku usaha mikro sangatlah terbatas, (2) Sub Indikator Trust Building (Membangun Kepercayaan), pada prinsipnya upaya membangun kepercayaan dalam berkolaborasi guna memberdayakan pelaku usaha ekonomi mikro di desa ini belum terlaksana karena bentuk kolaborasi masih sangat sederhana dengan cuma melibatkan pihak masyarakat dengan pemerintah desa dalam bentuk bantuan usaha terbatas, (3) Sub Indikator Commitment to the Process (Komitmen pada Proses Kolaborasi). Pada Perspektif analisa kualitatif pada segmen ini ditemukan kenyataan belum pernah ada program kolaborasi yang lengkap. Kerja sama hanya bersifat sederhana antar pemerintah desa dengan pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga yang hanya berfungsi sebagai penasehat keuangan saja. Walaupun komitmen yang terbangun sangatlah kuat namun tidak membawa dampak manfaat yang signifikan bagi kemajuan usaha karena di desa waiheru tidak pernah ada pelibatan pihak bank operasional seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri yang dapat memberikan kemudahan bagi kredit modal usaha warga di desa ini, (4) Sub Indikator Shared Understanding (Pemahaman Bersama). Di desa Waiheru, belum ada pemahaman bersama terhadap satu misi yang jelas, dimana misi tersebut akan dijadikan pegangan oleh setiap stakeholder untuk mengambil tindakan secara bersama-sama dalam mengatasi problem usaha mikro karena kolaborasi pemahaman bersama di antara stakeholder sangat terbatas dan tidak ada keunggulan komparatif yang dapat diandalkan dalam mendukung misi bersama mengentaskan kemiskinan, (5) Sub Indikator Intermediate Outcomes (Dampak Sementara), pada dasarnya Pemerintah Desa Tidak Pernah mencari jalan untuk membangun MoU dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten dengan peningkatan Usaha Mikro dan Kecil didesa ini, sehingga dampak usaha dari para pelaku usaha mikro di desa ini sama sekali tidak terasa.

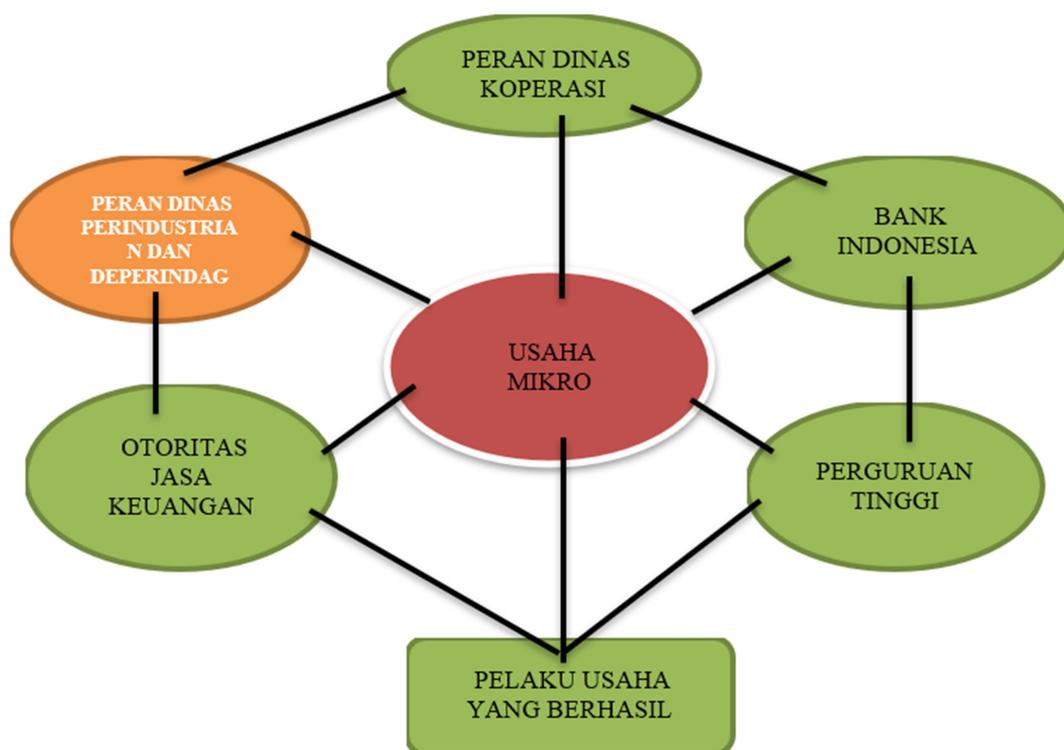
Temuan Indikator 2. Faktor-faktor Penghambat: (1) Sub Indikator Faktor Rendahnya Pengetahuan, Jiwa usaha dan Kemandirian Berusaha dari Masyarakat. Masyarakat Desa Waiheru memiliki Pengetahuan usaha yang masih rendah, Jiwa usaha yang belum berkembang baik dan belum terciptanya Kemandirian Berusaha sehingga berdampak pada pengembangan kerja sama bagi usaha mikro di desa ini, (2) Sub Indikator Faktor Kesadaran Para Pihak dalam berkolaborasi. Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi mikro tidak berhasil karena belum ada pengertian baik dan penyatuan sudut pandang dari lembaga terkait yang berkompeten dalam menyatukan program mereka serta faktor dominan yang terjadi ialah pelaku usaha mikro di desa ini tidak sadar, tidak disiplin dan merekah sendiri yang menggagalkan kolaborasi di desa ini serta mereka (Pelaku usaha kecil) cenderung tidak mau diatur dan kepala batu, tidak sadar akan nasib hidup mereka yang sudah semakin memperhatikan, (3) Sub Indikator Faktor Ego Personal dan Lembaga dari Para Pihak. Karakter agen dari lembaga-lembaga kolaborator terkesan egois dan arogan dalam pelatihan di tingkat desa sehingga dinilai tidak baik dan dapat menghalangi kolaborasi dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro dari warga masyarakatnya sendiri, (4) Sub Indikator Faktor Anggaran. Aspek keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kolaborasi dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, hal ini berpengaruh pada pengembangan usaha mikro di desa waiheru. Pada disisi lain dalam

pembagiannya menurut warga ada kecenderungan pilih kasih dalam setiap kebijakan terutama dalam pembagian bantuan pada masyarakat usah kecil yang berhak menerimanya.

Temuan Indikator 3. Strategi Model Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro harus ditempuh melalui strategi: (1) Sub Indikator Peran Pembinaan teknis Perdagangan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, di dalam memulai pembinaan teknis, hendaknya didahului dengan sosialisasi aturan tentang berbagai Kebijakan guna menanamkan pengetahuan usaha dibidang Industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebelum melangkah pada pembinaan teknis praktek usaha. Pemberdayaan dimulai dengan pelatihan serta pendampingan dan pelaporan berbagai segmen usaha yang dibina seperti Pelatihan Dasar Variasi Olahan Ikan Tuna dalam bentuk Tuna Asap, Tuna Asap Cair dan Abon Tuna, pelatihan rias penganten, Pelatihan Penjahitan Mode Pakaian, Bordir, Busana Kebaya Modern, Variasi Aplikasi Motif Bordir, Pembuatan Alas kaki dari sabuk kelapa, pembuatan dan pengolahan berbagai jenis makanan dari bahan tempe tahu, pembuatan aneka kerupuk dan lain-lain, (b) Sub Indikator Peran serta Fungsi Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi. Peran Fungsi Pembinaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Ambon yang dilakukan selama ini masih berupa pelatihan-pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota ini, seperti packaging atau pengemasan produk bentuk permodalan usaha dan perizinan pembuatan merek ada pula pelatihan pemasaran (melalui website dan media sosial seperti bukalapak, facebook, instagram). Seharusnya perlu pemberian tips-tips usaha yang jitu untuk meningkatkan omset usaha, perlu juga ketegasan dalam penegakan aturan yang mengikat selama memperoleh pembinaan dan pengembangan usaha. Pelatihan yang berorientasi proyek (Habis program selesaila hubungan) dengan anggota binaan harus diubah dengan hubungan binaan usaha yang berorientasi kemitraan yang saling menguntungkan. Bantuan pinjaman dana untuk modal usaha hanya dianjurkan agar dikembalikan tepat waktu dan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat non formal berupa komunikasi dan silahturahim saja oleh para petugas, orientasi hubungan kemitraan seperti ini harus dirubah, (3) Sub Indikator Peran serta Unsur Perbankan Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU). Upaya Bank Indonesia dalam melakukan Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) diawali dengan penelitian berkala untuk memberikan data dan informasi dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, melalui informasi pasar tentang permintaan dan penawaran, Serta untuk memberikan input tentang Kebijakan Pemerintah terutama Pemerintah Daerah tentang pengembangan UMKM, memberikan informasi terkait Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM, informasi tentang Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) unggulan yang perlu mendapat prioritas pengembangan di suatu kabupaten/kota dan kecamatan sebagai upaya Mendukung pembangunan ekonomi daerah - Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja - Meningkatkan daya saing produk, (4) Sub Indikator Peran perluasan akses atau inklusi keuangan oleh OJK. Edukasi tentang literasi keuangan ini untuk memperdayakan UMKM agar dapat mengakses sumber pendanaan dan memiliki keterampilan pengelolaan keuangan agar pelaku UMKM dapat menimbang pilihan dalam mencari cara pembiayaan yang tepat untuk mengoptimalkan usaha. Literasi dan inklusi keuangan juga akan membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan. - Edukasi keuangan dilakukan untuk UMKM agar mempunyai catatan keuangan yang baik rapih serta dapat memberikan laporan keuangan yang transparan dan baik, mempermudah bank dan investor untuk menilai resiko usaha dalam upaya memberikan bantuan kredit. Memahami kebutuhan usaha dan mekanisme pembayaran atau pelunasan pinjaman yang sama-sama menguntungkan. Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan usaha dalam mendapatkan pembiayaan, (5) pengembangan

kemampuan sumber daya manusia menjadi tindakan nyata yang perlu dipersiapkan dalam membangun pengetahuan, keterampilan, potensi, bakat, dan kompetensi dasar sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas usaha pelaku usaha mikro menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kualitas SDM berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang, mengacu pada Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan melahirkan Kemampuan (abilities) yang diharapkan, hanya dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas, (6) dalam pengembangan UMKM faktor pertama yang harus dirubah adalah mindset usaha dari para pelaku usah, kehadiran para pelaku usaha yang telah berhasil merintis usaha sangat bermanfaat untuk memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaku usaha agar mampu melihat peluang baru dalam pengembangan bisnis sehingga bisa berdaya saing. Namun yang terpenting adalah merubah mindset dan memberikan motivasi usaha.

### Model Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Mikro



Misalnya dalam model kemitraan, permodalan dan pemasaran yang sifatnya pilot project pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon kepada pelaku usaha mikro dari masyarakat rentan stunting, maka yang harus dilibatkan adalah:

(1) Dinas Koperasi UMKM Kota Ambon dilibatkan untuk memberikan materi usaha bagi pelaku usaha mikro berupa materi packaging atau pengemasan produk bentuk permodalan usaha dan perizinan pembuatan merek, pelatihan pemasaran (melalui website dan media sosial seperti bukalapak, facebook, instagram), pemberian tips-tips usaha yang jitu untuk meningkatkan omset usaha, perlu juga pembinaan disiplin dalam pengembangan usaha dalam hubungan binaan usaha yang berorientasi kemitraan yang saling menguntungkan. Pemberian pinjaman dana untuk

modal usaha hanya dianjurkan agar dikembalikan tepat waktu dan pengawasan dengan disiplin pembayaran yang berorientasi kemitraan.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, memulai pembinaan teknis dengan sosialisasi aturan tentang berbagai kebijakan guna menanamkan pengetahuan usaha dibidang industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebelum melangkah pada pembinaan teknis praktek usaha. Pemberdayaan dimulai dengan pelatihah serta pendampingan dan pelaporan berbagai segmen usaha yang dibina seperti pelatihan dasar variasi olahan ikan tuna dalam bentuk tuna asap, tuna asap cair dan abon tuna, pelatihan rias penganten, pelatihan penjahitan mode pakaian, bordir, busana kebaya modern, variasi aplikasi motif bordir, pembuatan alas kaki dari sabuk kelapa, pembuatan dan pengolahan berbagai jenis makanan dari bahan tempe tahu, pembuatan aneka kerupuk dan lain-lain.

(3) Bank Indonesia sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU), diawali dengan penyajian hasil penelitian berkala tentang data dan informasi terkini tentang potensi pasar di suatu kawasan yang dapat mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, melalui informasi pasar tentang permintaan dan penawaran, Serta untuk memberikan input terkini tentang kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah tentang pengembangan umkm, memberikan informasi terkait peranan perbankan dalam pengembangan UMKM, informasi tentang Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) unggulan yang perlu mendapat prioritas pengembangan di suatu kabupaten/kota dan kecamatan.

(4) Keterlibatan OJK terkait dengan edukasi literasi keuangan untuk memperdayakan UMKM agar dapat mengakses sumber pendanaan dan memiliki keterampilan pengelolaan keuangan agar pelaku UMKM dapat menimbang pilihan dalam mencari cara pembiayaan yang tepat untuk mengoptimalkan usaha. Agar mempunyai catatan keuangan yang baik rapih serta dapat memberikan laporan keuangan yang transparan dan baik, mempermudah bank dan investor untuk menilai resiko usaha dalam upaya memberikan bantuan kredit. Untuk mempermudah upaya mengajukan kredit kepada lembaga keuangan, mengurangi kegagalan pasar usaha yang disebabkan oleh adanya iformasi asimetri antara pemberi modal degan lembaga keuangan tentang kondisi dan perkembangan usaha.

(5) Pengembangan kemampuan sumber daya manusia untuk mempersiapkan kualitas SDM berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang, mengacu pada Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan melahirkan Kemampuan (abilities) yang diharapkan, hanya dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas.

(6) Faktor pertama yang harus dirubah dalam pengembangan usaha adalah mindset dari para pelaku usah, kehadiran para pelaku usaha yang telah berhasil bermanfaat untuk memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaku usaha mikro agar mampu melihat peluang baru dalam pengembangan bisnis sehingga bisa berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Indikator 1, Implementasi Collaborasi Governance berada pada kategori Sangat tidak baik (1,56), dengan temun dari riset adalah : (1) Dialog tatap muka pernah dilakukan namun hanya terbatas pada tiga pihak yakni pihak pemerintah desa, pelaku usaha mikro dan dinas badan terkait, sehingga informasi tentang kiat-kiat usaha yang didapatkan pelaku usaha mikro sangatlah terbatas, (2) Upaya membangun kepercayaan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro belum terlaksana dengan baik karena bentuk kolaborasi masih sangat sederhana dengan cuma melibatkan pihak masyarakat dangan pemerintah desa dalam bentuk bantuan usaha terbatas, (3) Kerja sama hanya bersifat sederhana antar pemerintah desa dengan pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga yang hanya berfungsi sebagai penasehat keuangan semata. Pada sisi

lain walaupun komitmen yang terbangun sangatlah kuat namun tidak membawa dampak manfaat yang signifikan bagi kemajuan usaha karena di Desa Waiheru karena tidak pernah ada pelibatan pihak bank operasional seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri yang dapat memberikan kemudahan bagi kredit modal usaha warga di desa ini, (4) Belum ada pemahaman bersama terhadap satu misi yang jelas, dimana misi tersebut akan dijadikan pegangan oleh setiap stakeholder untuk mengambil tindakan secara bersama-sama dalam mengatasi problem usaha mikro karena kolaborasi tentang pemahaman bersama di antara stakeholder sangat terbatas dan tidak ada keunggulan komparatif yang dapat diandalkan dalam mendukung misi bersama mengentaskan kemiskinan, (5) Pemerintah Desa tidak pernah mencari jalan untuk membangun MoU dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten dengan peningkatan usaha mikro dan kecil di desa ini, sehingga dampak usaha dari para pelaku usaha mikro di desa ini sama sekali tidak terasa.

Indikator 2, faktor-faktor penghambat, para responden menjawab bahwa rangkaian sub indikator dibawah inilah adaah faktor-faktor penghambat Collaborative Governance dalam pengembangan usaha mikro pada lokus penelitian (1,42) yakni: (1) Masyarakat Desa Waiheru memiliki pengetahuan usaha yang masih rendah, jiwa usaha yang belum berkembang baik dan belum terciptanya kemandirian berusaha sehingga berdampak pada pengembangan kerja sama bagi usaha mikro di desa ini, (2) belum ada pengertian baik dan penyatuan sudut pandang dari lembaga terkait dalam menyatukan program mereka serta faktor dominan lainnya ialah ketidaksadaran pelaku usaha mikro serta ketidakdisiplinan pelaku usaha sehingga menggagalkan kolaborasi karena pelaku usaha kecil cenderung tidak mau diatur dan kepala batu, tidak sadar akan nasib hidup mereka yang sudah semakin memperihatinkan, (3) Karakter agen (Petugas) dari lembaga-lembaga kolaborator terkesan egois dan arogan dalam pelatihan, sehingga dinilai tidak baik dan menghalangi kolaborasi, (4) Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kolaborasi serta distribusi anggaran yang terbatas.

Temuan indikator 3, para responden sepakat bahwa Stategi Model Collabortive Governance dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro (4,67), harus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pembinaan teknis perdagangan harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya, (2) Fungsi pembinaan usaha mikro oleh harus pula dilakukan secara terpadu dengan lembaga terkait lainnya oleh Dinas Koperasi UMKM, (3) Peran serta unsur perbankan (Bank Indonesia) harus bergerak sebagai Pembina Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) dalam setiap pelatihan usaha mikro dengan menyajikan data-data terkini hasil survei terkait potensi dan peluang usaha, jenis komoditi usaha serta lokasi usaha yang tepat sesuai hukum ekonomi permintaan dan penawaran, (4) Peran serta OJK sangat diperlukan dalam pelatihan dan bimbingan usaha mikro dalam perluasan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang akses atau inklusi keuangan dalam kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha, (5) Keterlibatan unsur perguruan tinggi sangat berguna bagi pengembangan kemampuan sumber daya manusia guna pengembangan Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan melahirkan Kemampuan (abilities) yang dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas, (6) Dalam pengembangan UMKM faktor pertama yang harus dirubah adalah mindset usaha dari para pelaku usah, kehadiran para pelaku usaha yang telah berhasil merintis usaha sangat bermanfaat untuk memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaku usaha agar mampu melihat peluang baru dalam pengembangan bisnis sehingga bisa berdaya saing. Namun yang terpenting adalah merubah mindset dan memberikan motivasi usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Gash, A, (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley: Oxford University Press.
- Afdal, (2015). Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol.3 No.2.
- Chang, H. J. (2009). *Collaborative Governance in Welfare Service Delivery: Focusing on Local Welfare System in Korea*. International Review of Public Administration.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press. Yogyakarta.
- Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Junaidi. (2015). *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. Naskah Publikasi Fisip Umrah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang *Pedoman Alokasi Dana Sharing Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan*
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- La Suhu, B., Suaib, R., Abdul, I., & Wance, M. (2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2(1), 19-28.
- La Suhu, B., Wance, M., Pora, P., & Kaunar, A. (2019). Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 5(2), 347-362.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. UI Press. Jakarta.
- Subarsono.2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif*. Gava Media. Yogyakarta.
- Salman, S., Arifin, Z., & Hasdinawati, H. (2023). Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2(1), 45-50.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.
- Zaenuri, Muhammad. 92016). Skripsi. *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Kabupaten Selemang)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta